

# AKSESIBILITAS SARANA SANITASI BAGI DIFABEL DI TEMPAT TRANSPORTASI UMUM

**ELISABETH DETA LUSTIYATI, MERITA EKA RAHMUNİYATI**

Universitas Respati Yogyakarta

[elisabethdeta@gmail.com](mailto:elisabethdeta@gmail.com)

## ***Abstract***

*Persons with disabilities often experience obstacles because there are no accessible facilities available to them in public places. The purpose of this study is to obtain an overview of the accessibility of public toilets in public transportation located in Yogyakarta. The research took the case of Giwangan bus station, Yogyakarta (Tugu) train station, Lempuyangan train station, Wates train station, Maguwoharjo train station, and Adisutjipto airport. This type of research is descriptive evaluative. Data collection is done by using purposive sampling technique and by the method of observation, documentation, and interviews. The results of this study indicate that the accessibility of sanitation services at Adisucipto airport and all train stations is good; while accessibility at the Giwangan terminal is still lacking.*

**Keywords:** accessible public transportation; accessible toilet; accessibel train bus station; accessible airport toilet

### **Abstrak**

Para difabel sering mengalami hambatan karena tidak terdapatnya fasilitas yang aksesibel bagi mereka di tempat-tempat umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran aksesibilitas toilet umum bagi difabel di tempat transportasi umum DIY. Penelitian mengambil kasus di terminal Giwangan, stasiun Yogyakarta (Tugu), stasiun Lempuyangan, stasiun Wates, stasiun Maguwoharjo, dan bandar udara Adisutjipto. Jenis penelitian ini adalah deskriptif evaluatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan sanitasi di bandar udara Adisucipto dan semua stasiun kereta api sudah baik; sementara aksesibilitas di terminal Giwangan masih kurang.

**Kata kunci:** aksesibilitas layanan transportasi; aksesibilitas toilet; toilet difabel; toilet aksesibel.

### **A. Pendahuluan**

Penyandang disabilitas atau difabel adalah kelompok masyarakat dengan keterbatasan yang dapat menghambat peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat (Agus Diono, Mujaddid, Fanciscus Adi Prasetyo, & Didik Budijanto, 2014, hlm. 1). Berdasarkan data *Economic and Social Commission for Asia and Pasific* (ESCAP) terdata 650 juta penyandang disabilitas berada di kawasan Asia dan Pasific (PBB Komisi Ekonomi dan Sosial Untuk Asia dan Pasifik, 2012, hlm. 28). Negara Indonesia telah mengamatkan jaminan akses bagi penyandang disabilitas salah satunya melalui UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat tentang Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat, dimana dinyatakan dalam UU tersebut bahwa upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. Penyediaan sarana yang memadai bagi para disabilitas diharapkan mampu meningkatkan potensi dan peran difabel.

---

INKLUSI:

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

## *Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum*

Disabilitas dapat terjadi karena masalah kesehatan yang diidap sejak dini, penyakit kronis maupun akut, cedera oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana, dan sebagainya (Agus Diono dkk., 2014, hlm. 1). Jumlah difabel di DIY mencapai 40.050 orang dan menempati posisi keempat terbanyak di antara 14 propinsi di Indonesia (Kebijakan Bappeda DIY Pemenuhan Hak Difabel., t.t., hlm. 1). Difabel memiliki akses yang terbatas dibandingkan dengan orang lain pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan layanan publik, termasuk aksesibilitas bangunan fisik. Para difabel sering mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena tidak terdapatnya fasilitas-fasilitas yang mendukung di tempat umum, salah satunya toilet (Dewi Warsito, 2015).

Toilet sebagai sarana sanitasi di tempat umum dibutuhkan semua orang, karena kegiatan buang air termasuk kegiatan darurat yang tidak bisa ditunda (Dewi Warsito, 2015). Toilet yang baik adalah toilet yang dirancang dengan memperhatikan semua penggunanya, terlebih lagi orang yang memiliki keterbatasan fisik (Kusnul Isti Qomah, 2015). Desain toilet harus disesuaikan agar dapat digunakan dengan mudah oleh difabel. Sebagian negara maju di dunia sudah menyediakan toilet khusus ini di area publik, seperti di stasiun, terminal, kantor pemerintahan, pasar bahkan pertokoan (Dewi Warsito, 2015).

Keterbatasan fungsi tubuh dan ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan akan sanitasi air bersih merupakan hambatan yang signifikan bagi difabel untuk mengakses sanitasi air bersih (White, Kuper, Itimu-Phiri, Holm, & Biran, 2016, hlm. 1) telah dibuat peraturan dan perundangan tentang aksesibilitas bagi difabel, namun kenyataannya pelaksanaannya belum dapat dikatakan efektif dan menjadi diskriminasi sebagian masyarakat (M. Syafe'ie, Purwanti, & Mahrus Ali, 2014, hlm. 1). Untuk itu diperlukan rancangan toilet khusus bagi difabel yang sesuai dengan prinsip ergonomi dan *utilitas*-nya (Tavares & Montenegro, 2012, hlm. 5).

Penyediaan fasilitas toilet umum di tempat transportasi umum seharusnya menyesuaikan dengan ketentuan teknis toilet bagi difabel sesuai dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006. Berdasarkan hasil observasi awal di stasiun Lempuyangan pada Agustus 2018 terdapat

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu: a) tidak terdapatnya jalur pemandu dan tanda penunjuk ke arah toilet bagi difabel di stasiun Lempuyangan; b) rampa atau tangga landai menuju toilet yang curam sehingga difabel pengguna kursi roda tidak dapat mencapai masuk tanpa bantuan orang lain; c) toilet bagi difabel di stasiun Lempuyangan dalam keadaan terkunci sehingga difabel tidak bisa mengaksesnya secara mandiri. Selain itu, hasil observasi pada Juli 2018 di tempat transportasi darat yang lain yaitu terminal Giwangan ditemukan hal serupa di mana tidak disediakan toilet khusus bagi difabel.

Penelitian ini memfokuskan pada peninjauan implementasi *stakeholders* terkait dengan sarana sanitasi bagi difabel di tempat transportasi umum DIY, sejauh mana kesesuaian standar aksesibilitas yang telah ada dan bagaimana para *stakeholder* menilai aksesibilitas tempat transportasi umum.

## **B. Pembatasan dan Definisi**

### **1. Penyandang disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1, Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016). Penyandang disabilitas sering juga disebut difabel. Difabel ialah singkatan dari bahasa Inggris *differently abled*, atau orang-orang yang mampu melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda (Maftuhin, 2016). Dengan demikian, masyarakat pada umumnya diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai yang berbeda. Semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan, kemudian diubah menjadi pemahaman sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara pencapaian yang berbeda pula (I Pratiwi, 2012, hlm. 10).

## **2. Aksesibilitas**

Aksesibilitas fisik merupakan isu penting untuk penerapan desain bagi difabel. Dalam perkembangannya saat ini banyak bangunan yang sudah mulai memperhatikan aksesibilitas pada sirkulasinya (Narulita Anugrahing Widi & Rullan Nirwansyah, 2013, hlm. 20). Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006, 2006). Aksesibilitas merupakan syarat penting bagi difabel untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Priscyllia, 2016)

Dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (8) tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi dari aksesibilitas, yaitu: “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.” Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa :

Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Menurut (Dewang & Leonardo, 2010, hlm. 14) aksesibilitas mencakup asas-asas, sebagai berikut:

- a. **Kemudahan**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. **Kegunaan**, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. **Keselamatan**, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- d. **Kemandirian**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

### **3. Sarana Sanitasi (Toilet)**

Toilet umum adalah sebuah ruangan yang dirancang khusus lengkap dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain yang bersih, aman dan higienis di mana masyarakat di tempat-tempat domestik, komersial maupun publik dapat membuang hajat serta memenuhi kebutuhan fisik, sosial dan psikologis lainnya (Adiwoso, 2015 hal 3). Standar toilet umum mengenai jumlah, lokasi, desain, material, visibilitas, aksesibilitas dan kemudahan pemeliharaan sangat diperlukan untuk menjamin toilet umum yang tersedia memenuhi syarat kelayakan, mudah digunakan dan dipelihara (I Ketut Bagiastra, 2013, hlm. 14).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30/PRT/M/2006 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, persyaratan mengenai toilet umum bagi difabel sebagai berikut:

a. Esensi

Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya dengan memperhatikan:

- 1) Jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
- 2) Pemisahan antara laki-laki dan perempuan;
- 3) Penggunaan material yang tidak licin dan berbahaya;
- 4) Lokalisasi terhadap kebocoran; dan
- 5) Kemampuan manuver pengguna kursi roda untuk toilet difabel.

b. Persyaratan

- 1) Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/symbol dengan sistem cetak timbul "Penyandang Cacat" pada bagian luarnya.
- 2) Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- 3) Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm.

- 4) Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat/*handrail* yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
- 5) Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran/*shower* dan perlengkapan-perengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.
- 6) Semua kran sebaiknya dengan menggunakan sistem pengungkit dipasang pada wastafel, dll.
- 7) Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin.
- 8) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda.
- 9) Kunci-kunci toilet atau grendel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- 10) Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

Di dalam toilet juga terdapat sebuah wastafel dan bangunan fisiknya telah diatur dalam Permen PU No. 30/PRT/M/2006 yang membahas tentang wastafel bagi difabel adalah sebagai berikut:

a. Esensi

Fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.

b. Persyaratan

- 1) Wastafel harus dipasang sedemikian sehingga tinggi permukaan dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda dengan baik.
- 2) Ruang gerak bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel.

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

- 3) Wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda.
- 4) Pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi roda.
- 5) Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.

---

*INKLUSI:  
Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

#### **4. Situasi Pelayanan Transportasi Umum bagi Difabel di Yogyakarta**

Pelayanan transportasi publik yang tersedia di Kota Yogyakarta tergolong sudah mulai mengadopsi kebutuhan difabel meskipun belum optimal. Namun di tiga kabupaten di wilayah DIY yaitu Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo sama sekali belum menyediakan sarana prasarana transportasi yang ramah difabel. Selama ini pemerintah daerah di tiga kabupaten tersebut sedang memperbaiki sarana prasarana transportasi umum seperti pelebaran dan pengaspalan jalan, peningkatan pelayanan bus AKDP, serta himbauan untuk membangun sarana gedung perkantoran yang ramah difabel, seperti adanya jalan landai dan toilet khusus difabel (Rahayu, Dewi, & Ahdiyana, 2013, hlm. 118).

Menurut (Suminar, 2015, hlm. 175) kemudahan bagi difabel dalam mengakses moda transportasi umum tergantung pada kondisi fisik setiap difabel. Sebagian dari mereka masih mengalami kesulitan karena, angkutan umum ramah difabel belum banyak tersedia. Keadaan tersebut menyebabkan difabel belum mampu menggunakan moda transportasi secara mandiri.

#### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif evaluatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk melihat gambaran dan penilaian aksesibilitas sarana sanitasi di masa sekarang dan hasil penelitian dipergunakan untuk perencanaan perbaikan di masa yang akan datang (Notoatmodjo, 2005, hlm. 36). Pendekatan evaluatif bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan program yaitu tingkat

## *Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum*

aksesibilitas (Sukmadinata, 2016, hlm. 125). Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-September 2018, menggunakan teknik *purposive sampling* dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Sampel penilaian tingkat aksesibilitas toilet bagi difabel di tempat transportasi umum DIY yaitu Terminal Giwangan, Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Wates, Stasiun Maguwoharjo, dan Bandara Udara Adisutjipto.

Informan yang dilibatkan terkait dengan pemenuhan aksesibilitas di tempat transportasi umum yaitu:

1. NS, pengguna kruk dari LSM Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
2. AL, tunanetra dari LSM Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)
3. PS, tunanetra dari LSM SIGAB
4. HH, Bagian Fasilitas Penumpang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta
5. AF, Pengelola Transportasi Terminal Tipe A Giwangan
6. RA, Bagian *Customer Service and Hospitality* Bandar Udara Adisutjipto
7. AR, Seksi Angkutan Perkotaan Dinas Perhubungan DIY
8. IS, Seksi Perumahan dan Permukiman Dinas PUPKP DIY

### **D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### a. Bandar Udara Adisutjipto

Bandara ini adalah bandar udara yang melayani penerbangan domestik dan internasional yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I. Bandar udara ini terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Luas bandara ini adalah sekitar 183 hektar. Bandara Adisutjipto bertransformasi menjadi bandara internasional pada tanggal 21 Februari 2004. Jumlah penumpang pesawat terbang yang naik maupun turun di Bandar Udara Adisutjipto sepanjang 2016 berjumlah 7.208.557 orang. (Prabowo Cahyo Ariyono, 2018, hlm. 17).

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,*

*Vol. 6, No. 1*

*Jan-Jun 2019*

INKLUSI:  
*Journal of  
Disability Studies,*  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019



Bandar Udara Adisutjipto



Stasiun Tugu Yogyakarta



Stasiun Lempuyangan



Stasiun Maguwoharjo



Stasiun Wates



Terminal Giwangan

Gambar 1.  
Toilet yang Tersedia bagi Penyandang disabilitas di Tempat  
Transportasi Umum DIY

#### b. Stasiun Kereta Api

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta memiliki daerah operasi di Jawa Tengah dan DIY. Profil DAOP 6 dan stasiun di DIY. Stasiun wilayah DAOP 6 yang terletak di DIY adalah : Stasiun Yogyakarta (YK, Stasiun Besar Kelas A), Stasiun Lempuyangan (LPN, Stasiun Besar Kelas C), Stasiun Wates (WT, Stasiun Kelas 1), dan

Stasiun Maguwo (MGW, Stasiun Kelas 2). Volume penumpang kereta di daerah pelayanan DAOP 6 selalu meningkat setiap tahunnya, jumlah penumpang baik KA Lokal dan Utama 2017 mencapai 404.973 orang dan tahun 2016 mencapai 326.621 orang (Tribunnews, 2018)

c. Terminal Giwangan

Terminal Giwangan adalah sebuah terminal angkutan umum yang terletak di kota Yogyakarta. Terminal ini terletak di Kelurahan Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, tepatnya di Jalan Imogiri Timur Km 6, di dekat perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul (Kementerian Perhubungan, 2012 hlm. 35). Terminal Giwangan dibangun untuk menggantikan Terminal Umbulharjo. Berdasarkan data sekunder (2016) Terminal Giwangan mengangkut penumpang sekitar 6.600 orang perharinya.

---

**INKLUSI:**  
*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

Tabel 1  
Jumlah Toilet untuk Difabel

No	Lokasi	Jumlah Toilet Difabel
1	Bandar Udara Adisutjipto	7 toilet difabel
2	Stasiun Tugu Yogyakarta	1 toilet difabel
3	Stasiun Lempuyangan	1 toilet difabel
4	Stasiun Maguwoharjo	1 toilet difabel
5	Stasiun Wates	1 toilet difabel
6	Terminal Giwangan	hanya terdapat 4 toilet umum

## **E. Gambaran Hasil Observasi Aksesibilitas Sarana Sanitasi**

Observasi dilakukan untuk mengetahui gambaran aksesibilitas sarana sanitasi secara kuantitatif. Penilaian menggunakan lembar observasi (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik penilaian dengan pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006. Penyusunan rubrik berdasarkan pada asas aksesibilitas (Dewang & Leonardo, 2010, hlm. 14), yaitu: keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian dan dilengkapi dengan indikator pencapaian seperti yang tercantum pada Tabel 2.

Selanjutnya, hasil penilaian akan dikategorikan berdasarkan tingkat aksesibilitas, yaitu baik (rerata skor 3,00 – 4,00), cukup (rerata skor 2,00 – 2,99), dan kurang (rerata skor 0 – 1,99).

Tabel 2  
Indikator Pencapaian Asas Aksesibilitas dalam Penilaian Sarana Sanitasi Tempat  
Transportasi Umum di DIY

No	Asas Aksesibilitas	Indikator
1	Keselamatan	Ketinggian tempat duduk toilet
		Pegangan rambat ( <i>handrail</i> )
		Kondisi lantai
		Tombol bunyi darurat ( <i>emergency sound button</i> )
2	Kemudahan	Rambu/symbol difabel
		Bukaan pintu toilet
3	Kegunaan	Fasilitas toilet : wadah tissue, kran air
4	Kemandirian	Ruang gerak dalam toilet

INKLUSI:

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

a. Bandar Udara Adisutjipto

Sarana sanitasi harus dapat diakses oleh setiap pengguna, bahkan oleh difabel. Melalui hasil observasi dari 8 indikator pencapaian asas aksesibilitas toilet difabel di Bandar Udara Adisutjipto. Indikator yang belum terpenuhi oleh 4 toilet di bandar udara adalah indikator yang terkait dengan asas keselamatan yaitu keberadaan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*).

b. Stasiun Kereta Api di DIY

Pelayanan sanitasi bagi difabel telah dilakukan oleh Unit Fasilitas Penumpang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta dengan menyediakan 1 (satu) toilet difabel di setiap stasiun. Berdasarkan hasil observasi diperoleh satu indikator yang belum terpenuhi yaitu keberadaan tombol bunyi darurat.

c. Terminal Giwangan

Permasalahan sengketa aset Terminal Giwangan yang terjadi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT. Pelita Karya menjadi salah satu alasan Terminal Giwangan belum menyediakan sarana toilet difabel. Pemilikan aset yang belum jelas tersebut menyebabkan anggaran Kementerian Perhubungan hanya diperuntukan untuk kegiatan operasional. Oleh karena itu, observasi sanitasi dilakukan pada toilet yang ada di Terminal Giwangan dan diperoleh toilet hanya memenuhi 2

## *Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum*

indikator dari 8 indikator yaitu terkait kondisi lantai dan fasilitas toilet (kran air).

Secara ringkas, aksesibilitas sarana sanitasi bagi difabel telah terpenuhi dalam *kategori Baik* di Bandar Udara Adisutjipto dan Stasiun Kereta Api di DIY, dan *kategori Kurang* di Terminal Giwangan seperti tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3  
Hasil Observasi Aksesibilitas Sarana Sanitasi Tempat Transportasi Umum di DIY

No	Lokasi Penelitian	Skor Aksesibilitas				Rata-rata	Kategori Aksesibilitas
		K1	K2	K3	K4		
1	Bdr. Adisutjipto 1	3,2	3,5	4	4	3,6	baik
2	Bdr. Adisutjipto 2	4	3,5	4	4	3,8	baik
3	Bdr. Adisutjipto 3	3	3,5	4	4	3,6	baik
4	Bdr. Adisutjipto 4	4	3,5	4	4	3,8	baik
5	Bdr. Adisutjipto 5	3,2	3,5	4	4	3,6	baik
6	Bdr. Adisutjipto 6	3,7	3,5	4	4	3,8	baik
7	Bdr. Adisutjipto 7	3	3,5	4	4	3,6	baik
8	St. Yogyakarta	3,2	3,5	4	4	3,6	baik
9	St. Lempuyangan	3,2	3,5	4	4	3,6	baik
10	St. Maguwaharjo	3	3,5	4	4	3,6	baik
11	St. Wates	3,2	3,5	4	4	3,6	baik
12	Terminal Giwangan	1,7	1	3	1	1,6	kurang
	Rata-rata	3,2	3,2	3,9	3,7	3,5	

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,*

*Vol. 6, No. 1*

*Jan-Jun 2019*

Keterangan :

K1 : Asas Keselamatan

K2 : Asas Kegunaan

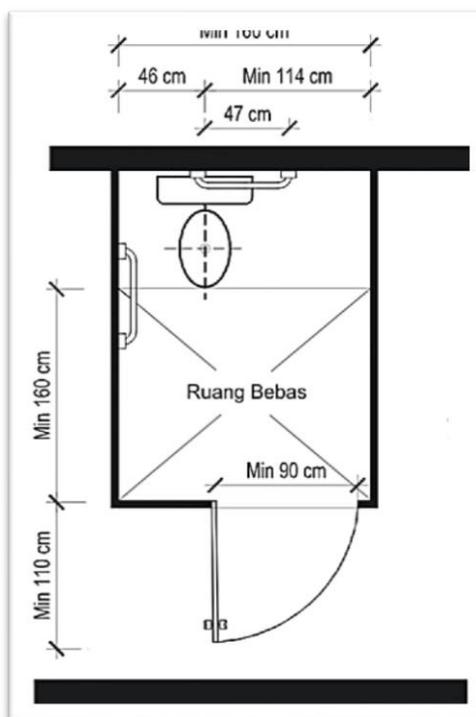
K3 : Asas Kemudahan

K4 : Asas Kemandirian

**INKLUSI:**

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

Asas Kemudahan mendapat ranking pertama menurut hasil observasi, dengan rerata tertinggi, yaitu 3,92. Melalui hasil observasi tersebut, hal ini terlihat dari letak toilet yang mudah diakses dan memiliki petunjuk berupa tulisan dan simbol bagi difabel. Sayangnya, ada hal yang belum memenuhi syarat, di mana tulisan tersebut cukup tinggi serta tidak dengan huruf timbul sehingga tanpa bantuan, tunanetra tidak mampu mengenali ruang toilet difabel. Kemudahan yang nampak dari toilet difabel yang berada di Bandar Udara Adi Sutjipto dan stasiun kereta api adalah toilet yang telah memenuhi standar luas yang mendukung ruang gerak untuk masuk dan keluar bagi pengguna kursi roda.



Gambar 1  
Ketentuan Ruang Gerak menurut Lampiran PMPU Nomor. 30/PRT/2006

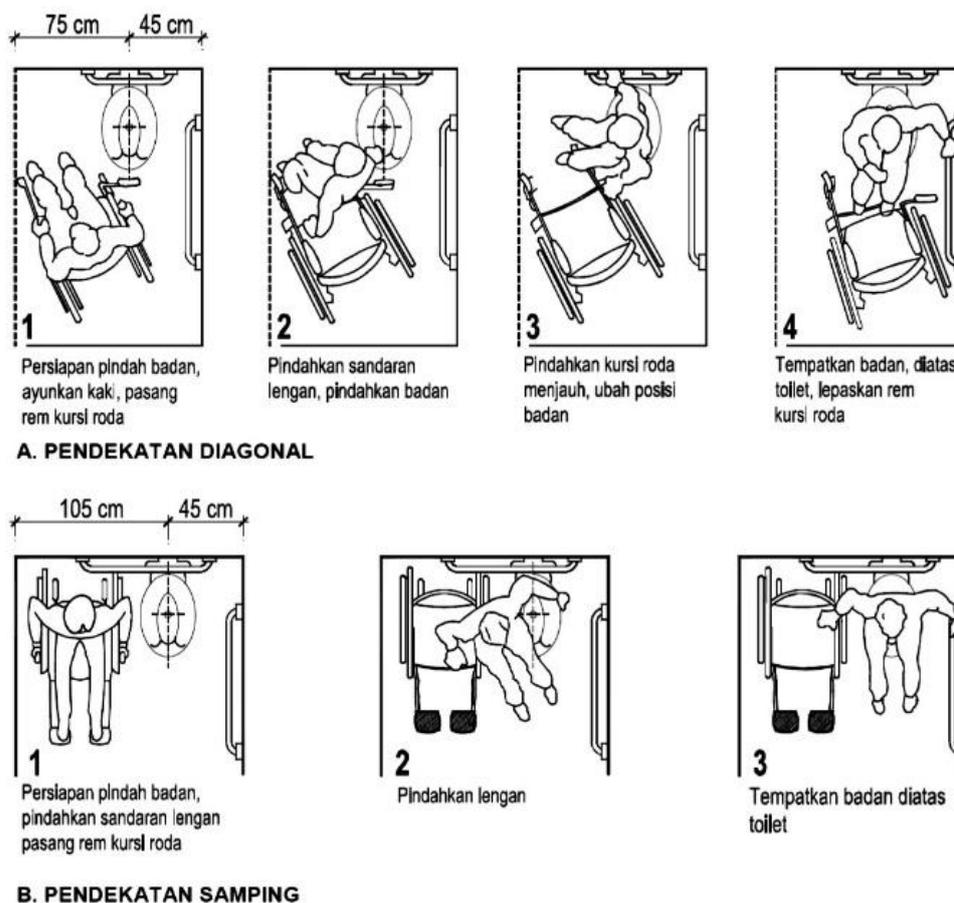
Kebutuhan luas ruang gerak di dalam toilet difabel cukup besar berdasarkan hasil analisa ruang gerak difabel yang menggunakan kursi roda

## Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum

(lihat Gambar 1). Ruang gerak pengguna kursi roda dapat menggunakan gerak pendekatan diagonal dengan lebar toilet lebih kecil (120 cm) daripada pendekatan gerak pendekatan samping yang membutuhkan lebar 150 cm (lihat Gambar 2). Oleh karena itu, penyedia layanan sanitasi bagi difabel sebaiknya menyediakan ruang gerak yang mempermudah difabel untuk bergerak dengan berbagai pendekatan. Berdasarkan hasil observasi luas ruang gerak dalam toilet difabel di Bandar Udara Adi soetjipto dan stasiun kereta api di DIY mampu untuk diakses pengguna kursi roda untuk bergerak masuk dan keluar toilet.

*INKLUSI:*

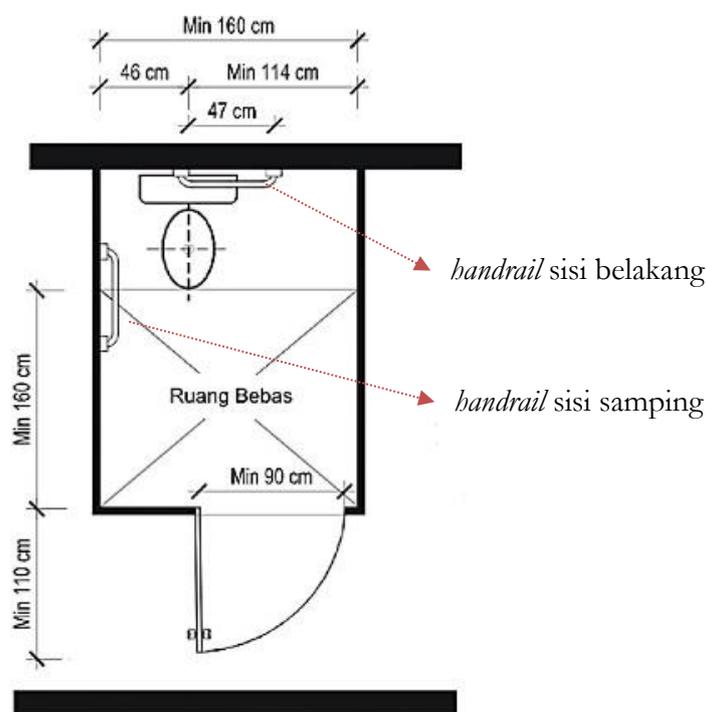
*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*



Gambar 2  
Analisa Ruang Gerak menurut Lampiran PMPU Nomor. 30/PRT/2006

Skor pada hasil penilaian asas keselamatan pada fasilitas toilet difabel adalah 3,21 (skor terendah), walaupun masih termasuk dalam aksesibilitas baik.

Indikator asas keselamatan yang belum tercapai secara maksimal dalam toilet difabel di tempat transportasi umum DIY adalah pegangan rambat (*handrail*) di sisi belakang dan samping toilet (lihat Gambar 3). Sebanyak 3 (tiga) dari 7 (tujuh) toilet di Bandar Udara Adi Soetjipto telah memiliki kelengkapan pegangan rambat samping dan belakang (lihat Gambar 4), sisanya hanya memiliki pegangan samping. Pada fasilitas toilet di stasiun kereta api, untuk fasilitas *handrail* belakang dan samping terdapat lengkap di Stasiun Tugu Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan (lihat Gambar 5), dan Stasiun Wates (lihat Gambar 5). Rubrik penilaian terakit dengan *handrail* disesuaikan dengan dengan denah ruang gerak toilet difabel.



Gambar 3  
Penempatan Handrail

*Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum*



*INKLUSI:  
Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

Gambar 4  
Keberadaan Handrail di Dalam Toilet Difabel Bandara Adi Soetjipto  
Sumber : observasi lapangan, 2018



Gambar 5  
Handrail Toilet Difabel Stasiun Lempuyangan.  
Sumber : observasi lapangan, 2018

Meskipun demikian, fasilitas toilet di kedua tempat transportasi umum tersebut telah memenuhi syarat minimal terkait dengan pegangan rambat yang telah ditentukan oleh peraturan terkait.

INKLUSI:  
*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*

Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat/handrail yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda. (Permen PU Nomor 30 Tahun 2006)

Indikator terkait asas keselamatan yang ada yang belum terpenuhi yaitu keberadaan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) (Gambar 6). Keberadaan tombol bunyi darurat disarankan untuk disediakan untuk mengantisipasi kesulitan atau bahaya yang dialami oleh difabel sewaktu di dalam toilet.

Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan" (Permen PU Nomor 30 Tahun 2006)



Gambar 6  
Emergency Button Toilet Difabel Bandar Udara Adi Soetjipto  
Sumber: observasi lapangan, 2018

## **F. Evaluasi Aksesibilitas**

Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh 8 narasumber yang mewakili difabel, pengelola fasilitas sanitasi di PT. Kereta Api DAOP 6 DIY, bandar udara Adisutjipto, terminal Giwangan dan instansi pemerintah yang terkait dengan kebijakan sanitasi bagi difabel, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPKP DIY. Tujuan wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah untuk melakukan pengumpulan data secara detail dari seluruh informan dengan menggali lebih dalam beberapa pertanyaan penelitian yang telah disusun oleh peneliti.

---

*INKLUSI:*  
*Journal of*  
*Disability Studies,*  
*Vol. 6, No. 1*  
*Jan-Jun 2019*

### **1. Kebijakan Aksesibilitas**

Secara umum kebijakan aksesibilitas diatur dalam Peraturan Menteri No.30/PRT//M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Peraturan tersebut telah banyak dipahami oleh para difabel, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan difabel (NS, 2018).

Pedoman pembuatan toilet difabel di Bandar Udara Adisutjipto menggunakan kesepakatan Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) sebagai pedoman standar toilet umum Indonesia. PT. Angkasa Pura I yang merupakan perusahaan yang memberi pelayanan lintas udara khususnya di Bandar Udara Adisutjipto memiliki aturan sendiri dalam pembuatan toilet difabel. Namun hal tersebut tidak terlepas dari peraturan yang ada dalam ATI, dan PT. Angkasa Pura I hanya menambahkan sedikit modifikasi.

Kalau dulu, yang minta itu perhubungan, jadi dokumen standar pelayanan publik itu *ya* benar-benar dokumen kita sebagai penyelenggara pelayanan kita semuanya bentuk pelayanan kita masukin ke dalam dokumen itu ... cuman ini masih proses *sih* mbak yang baru selesai itu Banjarmasin, Manado, Yogya, nah yang yang sisanya ini giliran-giliran nanti dari perhubungan yang menilainya ... misalkan difabel ini kan dari pelayanan ini sudah standar *bangetlah*, kalau dibilang *mandatori* hampir *mandatori* lah, jadi kalau tiap-tiap unit pelayanan tuh ketika ada toiletnya harus ada difabelnya (RA, 2018)

Terkait dengan kebijakan ketersediaan toilet bagi difabel telah dituangkan di dalam standar pelayanan pada bandar udara Adisutjipto

Yogyakarta pada uraian tentang sarana dan prasarana khusus. Dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa sarana dan prasarana khusus dirancang untuk ramah terhadap lansia, pengguna jasa kebutuhan khusus dan wanita. Adapun sarana dan prasarana khusus yang tersedia di Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, sebagai berikut: parkir kendaraan khusus difabel, rampa, *railling* pada tangga dan toilet khusus, kursi roda, area khusus di boarding gate, dan petugas *customer service*. "... kalau di aku ya, yang aku denger itu kalau penilaian toilet ada dari Asosiasi Toilet Indonesia" (RA, 2018)

Permasalahan umum yang berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan toilet mendorong terbentuknya World Toilet Organization (WTO) pada 2001 dan Indonesia secara resmi membentuk Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) sebagai bagian dari WTO. ATI merupakan organisasi yang fokus pada permasalahan kebersihan dan kesehatan, dengan salah satu program kerja ATI adalah melakukan penilaian terhadap toilet publik di Indonesia, dari sisi kebersihan, fasilitas, kelengkapan alat kebersihan hingga desain toilet. Melalui penilaian dari pihak eksternal seperti ATI, pihak bandara telah melaksanakan evaluasi dengan pengukuran secara riil kualitas layanan dan fasilitas toilet yang telah disediakan.

Penyediaan aksesibilitas sanitasi di wilayah DAOP 6 melibatkan dua unit yaitu: 1) Unit Pembangunan yang terlibat dalam perencanaan dan desain infrastruktur dan 2) Unit Fasilitas yang bekerja dalam pengelolaan dan perawatan sarana sanitasi.

Untuk pembangunan itu kami di unit bangunan dinas jadi mereka yang menyiapkan infrastrukturnya desain maupun apa pembangunannya rencananya, namun untuk pengelolaan dan perawatannya di kami di unit fasilitas (HH, 2018).

Persyaratan aksesibilitas toilet bagi difabel di seluruh stasiun dalam wilayah operasi DAOP 6 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM)

... syarat persyaratan minimal SPM 48 dari Kementerian ... dari kementerian sendiri secara periodik akan melakukan pemeriksaan terhadap SPM" (HH, 2018).

## *Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum*

Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi acuan PT. Kereta Api Indonesia adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api. SPM adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan kepada pengguna jasa yang dilengkapi dengan tolok ukur sebagai pedoman pelayanan. Standar pelayanan minimum penumpang di stasiun mencakup keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan.

Pelayanan akses sanitasi bagi difabel di terminal Giwangan belum tersedia sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena belum ada transisi pengelolaan terminal ke Kementerian Perhubungan karena aset terminal masih menjadi sengketa (AF, 2018).

Permasalahan tersebut menjadi hambatan terminal Giwangan untuk meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana bagi pengguna transportasi bus di D.I. Yogyakarta. Pemeliharaan dan pembangunan tidak bisa dilakukan karena permasalahan sengketa berakibat pada anggaran Kementerian Perhubungan yang hanya dialokasikan untuk kepentingan operasional, antara lain gaji pegawai, peralatan kantor, peralatan kebersihan. Meskipun demikian, menurut AF, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan evaluasi tentang kebutuhan akses sarana terminal bagi difabel (AF, 2018).

Pembangunan toilet difabel berdasarkan hasil evaluasi usulan masyarakat yang dapat dikemukakan di media massa. Peraturan tentang keberadaan toilet difabel untuk DIY saat ini masih mengikuti aturan umum menggunakan Permen PU Nomor: 30/PRT/M/2006 belum ada Peraturan Daerah yang mengatur ketersediaan prasarana dan sarana terkait toilet difabel.

Biasanya kami membuat toilet itu dari usulan masyarakat yang sepertinya sangat butuh, tapi ya tadi kendala-kendala yang muncul di kami ternyata ditolak oleh pihak sananya. Kami juga akan meminta tolong kepada media massa untuk mempertahankan untuk kepentingan umum. Untuk saat ini belum, karena belum ada protap dan perdanya terkait yang difabel (IS, 2018)

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

Pemerintah sudah mulai menyediakan akses toilet bagi difabel di beberapa titik keramaian di wilayah Kota Yogyakarta, seperti Jalan Panembahan Senopati (depan kantor perwakilan Bank Indonesia yaitu 1 toilet difabel (AR, 2018).

## 2. Tingkat Aksesibilitas

Penilaian dari pihak eksternal baik *stakeholder* maupun pengguna dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas sarana sanitasi.

Bandar Udara Adisutjipto melakukan penilaian tingkat aksesibilitas toilet dengan pihak eksternal yaitu ATI. Penilaian toilet yang dilaksanakan oleh ATI merupakan kegiatan yang dilakukan tiap tahun terhadap toilet di bandara-bandara di Indonesia. Penilaian toilet dilakukan dalam segi kebersihan, desain toilet, perlengkapan pendukung, petugas kebersihan, dan sistem perawatan. Hasil penilaian yang diberikan oleh ATI dalam bentuk rating bintang 1-5, dari kotor sampai paling bersih dan nyaman (RA, 2018).

Pengguna sarana sanitasi di tempat transportasi merupakan salah satu pihak eksternal yang perlu mendapatkan bagian dalam penilaian sarana sanitasi. PT. Kereta Api Wilayah DAOP 6 menggunakan penilaian pengguna untuk melakukan penilaian aksesibilitas toilet difabel.

...sampai saat ini memang kami belum dapat *ya*, artinya baik langsung maupun tidak langsung dari penggunaan toilet khususnya difabel tapi untuk toilet yang lain mungkin ada keluhan tapi kalau untuk difabel sampai hari ini belum ada masukan aaa... karena di toilet kami kan juga ada toilet satisfaction kepuasan pelanggan (HH, 2018).

Berdasarkan hasil penilaian pengguna, hingga saat ini PT. Kereta Api Wilayah DAOP 6 belum mendapatkan keluhan terkait dengan aksesibilitas toilet bagi difabel.

## 3. Asas Aksesibilitas

Informan pengguna toilet disabilitas memiliki beberapa masukan terkait dengan indikator aksesibilitas di tempat transportasi umum DIY.

### a) Keselamatan

Kondisi lantai menuju toilet difabel menentukan keselamatan para difabel. Berikut adalah masukan dari pengguna kruk terhadap kondisi fisik

lantai menuju toilet di Stasiun Tugu. “Saya pernah mengalami kesulitan yaitu lantainya licin, jadi kan kalau misalnya hujan ...” (NS, 2018).

Keberadaan tombol darurat di sarana sanitasi bagi difabel masih banyak yang belum menyediakan. Berdasarkan hasil *skoring* semua toilet disabilitas di dalam stasiun kereta api di wilayah DAOP 6 belum memiliki tombol darurat (NS, 2018).

...tidak semua ada penjaga dalam artian bahwa yang tadi yang *ngantar* itu berjaga di luar, nah sehingga dia membutuhkan tombol darurat itu kemudian untuk mencari bantuan atau dia mengalami sesuatu. Karena semua tidak semua bisa teriak, tidak semua bisa *moving* sendiri gitu secara mandiri (NS, 2018).

Jenis pelayanan toilet dalam SPM menggunakan indikator jumlah dan kondisi toilet menggunakan tolok ukur disesuaikan dengan jenis stasiun. Berdasarkan SPM dari Permenhub Nomor. 48 Tahun 2015 belum tercantum tentang persyaratan aksesibilitas toilet. Pada SPM tersebut khusus untuk penyediaan toilet penilaian dilakukan berdasarkan indikator jumlah dan kondisi toilet. Tolok ukur SPM terkait dengan toilet difabel memiliki tolok ukur yaitu tersedianya 1 (satu) toilet untuk penumpang difabel.

... sarana prasarana sesuai untuk para difabel yang difabelnya itu macam-macam itu memang butuh perencanaan gambar yang bagus kemudian harus dilihat juga *space* ruang yang dibutuhkan terutama difabel yang menggunakan kursi roda itu kan harus landai derajatnya itu harus berapa derajat kalau *ndak* salah 15 atau mungkin 10 derajat naiknya ramnya itukan butuh butuh ... tempatnya agak naik itukan umpama tempatnya agak terputus dari ruang utama itu keluar habis itu kemana (AR, 2018).

## **b) Kegunaan**

Beberapa difabel, khususnya tunanetra, tidak mengalami masalah apabila hanya mendapatkan toilet biasa (AL, 2018). Berbeda dengan tunanetra yang terbiasa dengan toilet biasa, tunadaksa menganggap fasilitas di toilet difabel memiliki beberapa fasilitas yang memiliki kegunaan untuk mempermudah akses di dalam toilet, salah satunya adanya *handrail* (NS, 2018).

---

**INKLUSI:**

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

### c) Kemudahan

Pelayanan petugas yang tanggap terhadap difabel yang berada di tempat transportasi umum, yaitu kereta api dan bandara. Hal tersebut sangat mempengaruhi kemudahan tunanetra untuk mendapatkan arah toilet difabel, selain petugas sikap simpati orang di sekitarnya meningkatkan aksesibilitas difabel (AL, 2018).

Selain tunanetra, pelayanan petugas juga diperoleh penyandang tunadaksa di Bandar Udara Adisoetjipto dengan memberikan bantuan akses kursi roda dan bantuan menuju ke toilet difabel.

... tapi begitu kita dapat akses kursi roda biasanya didorong untuk ke toilet. Kalau di bandara didorong sama yang membantu kita untuk kursi roda itu ada ... (NS, 2018).

Selain pelayanan petugas yang mampu menambah kemudahan difabel untuk mengakses toilet difabel. Kemudahan dalam bentuk fisik/sarana pada penggunaan toilet difabel adalah mengintegrasikan wastafel di dalam ruang toilet difabel, *handrail*, serta lokasi toilet yang dekat dengan akses penumpang. "Dengan adanya rampa dengan adanya *handrail* dan tidak terlalu jauh itu menurut saya sudah cukup kemudahan di sana."(NS, 2018).

### d) Kemandirian

Para difabel mampu secara mandiri mengakses toilet difabel dengan dukungan perencanaan ruang toilet. Penyandang tunadaksa khususnya pengguna kursi roda membutuhkan ruangan toilet yang mampu untuk ruang manuver, berdasarkan luas standar ruang minimal  $160 \times 160$  cm. Beberapa ruang toilet di tempat transportasi umum DIY memiliki ruangan yang memanjang, sehingga agak menyulitkan gerak kursi roda.

Menurut saya sih sebetulnya sudah bagus tapi memang ada dia kan posisinya ee toiletnya itu kecil dan memanjang. Sebenarnya kursi roda bisa masuk Cuma saya belum mencoba untuk muter kan sebetulnya keluasan sebenarnya bisa berputar tapi kayaknya dia searah kalau dia bisa keluar karena agak sempit (NS, 2018).

Tingkat kemandirian berbeda antara difabel satu dengan yang lain. Pada hasil wawancara dengan AL, seorang tunanetra yang mampu untuk mengakses toilet difabel dan toilet non-difabel (AL, 2018).

### e) Peruntukan Toilet Difabel

## *Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum*

Mengacu pada Permen PU No.30/2006 aksesibilitas adalah “kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia”. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa toilet difabel diperuntukan khusus bagi difabel. Hal tersebut yang menjadikan toilet difabel sangat jarang untuk diakses oleh penerima manfaat dari toilet difabel yang sebenarnya yaitu kelompok prioritas termasuk di dalamnya adalah lansia dan ibu hamil.

Melalui hasil wawancara dengan RA, diperoleh keterangan bahwa hasil audit Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Adisutjipto bahwa pihak PT Angkasa Pura perlu mempertimbangan istilah “toilet difabel” .

Di sini kemarin baru kita dapat temuan dari pelayanan publik dari perhubungan mereka menganjurkan difabelnya diganti, karena apa karena ya mereka yang merasa kurang, atau cacat, atau tua seperti itu, mereka tidak akan masuk kesana kalau mereka masih sanggup, jadi kayak tempat itu sebenarnya khusus benar bagi orang yang tidak mampu pegangan segala macam. sedangkan kalau di toilet kedatangan tuh antri nya kalau datang panjang banget itu maksudnya kata dia toiletnya diganti. Kalau misal saya orang tua, sudah tau banget, emang kita udah tua seharusnya lah ya masuk kesana, cuman saya gak akan mau. Nah itu menjadi PR kita juga (RA, 2018)

Difabel menganggap bahwa fasilitas di toilet difabel memiliki kriteria keamanan dan kemudahan yang paling tinggi dan penting untuk diakses semua orang, khususnya pengguna prioritas yaitu difabel, lansia, dan ibu hamil. Seperti yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia dengan memberikan istilah “kursi prioritas” yang diutamakan (jika ada) penumpang prioritas (difabel, lansia, dan ibu hamil) di gerbong tersebut. Melalui upaya tersebut diharapkan penerima manfaat aksesibilitas toilet difabel sesuai dengan sasaran.

kalau saya, karena saya difabelnya gak fisik, saya bisa aja asalkan apa namanya asalkan ada yang membantu kesana udah udah ngerti ya bisa. Tapi waktu saya di toilet yang difabel itu penuh orang, jadi saya tidak menggunakan yang difabel. Terus pernah juga di Jakarta toilet difabelnya malah dikunci. Jadi gak *ngerti, ya wes*. Katanya itu biar apa namanya biar gak dipakee non difabel. Tapi sebenarnya toilet aksesibel itu kan bukan hanya untuk difabel, tapi untuk semua. Jadi konsepnya malah sekarang menuju inklusi malah apa-apa kok khusus untuk difabel (NS, 2018).

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,*

*Vol. 6, No. 1*

*Jan-Jun 2019*

Ya kalau saya sih mbak kalau toilet difabel itu aksesibel sangat perlu artinya itu yang menggunakan bukan hanya difabel saja tetapi non difabel pun saya kira dapat menggunakan itu juga biar lebih nyaman saya kira kan , lebih longgar saya kira lebih enak . terlepas dari saya sendiri walaupun gitu tidak masalah” (AL, 2018).

INKLUSI:  
Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019

Isu tentang kepedulian akan difabel yang lebih luas, selain pada kelompok prioritas (lansia dan ibu hamil) yaitu pada difabel yang tidak terlihat (*invisible disabilities*) telah dilakukan dimunculkan di Kanada dengan mengganti istilah *disable toilet* menjadi *accessible toilet: not all disabilities are visible* (Prince, 2017) seperti tampak pada Gambar 7.



Gambar 7  
Slogan "not all disabilities are visible" di Toilet Difabel  
Sumber: [https://twitter.com/gda\\_online/status/904641889848131584](https://twitter.com/gda_online/status/904641889848131584)

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, serta hasil wawancara dilakukan langkah pemadatan fakta-fakta sejenis dalam bentuk unit informasi (lihat Tabel 4)

Tabel 4  
Penarikan Unit Informasi menjadi Tema

Unit Informasi	Sub Tema	Tema
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li> </ul>	Standar umum	Kebijakan Aksesibilitas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Pelayanan pada Bandar Udara Adisutjipto</li> </ul>	Standar unit penyedia transportasi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Standar Asosiasi Toilet Indonesia (ATI)</li> </ul>		

*Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum*

Unit Informasi	Sub Tema	Tema
<ul style="list-style-type: none"> <li>Permenhub No.48/2015 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Orang dengan Kereta Api</li> <li>Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur ketersediaan prasarana dan sarana toilet difabel</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian dari Asosiasi Toilet Indonesia (ATI)</li> <li>Pihak eksternal melalui <i>toilet satisfaction</i></li> </ul>	Penilaian eksternal	Tingkat aksesibilitas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lantai toilet licin saat musim hujan menyulitkan difabel tunadaksa.</li> <li>Beberapa toilet belum dilengkapi dengan tombol darurat.</li> <li>Rampa lantai terlalu tinggi yang masih menyulitkan akses difabel tunadaksa</li> </ul>	Keselamatan	Asas aksesibilitas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak masalah bagi tunanetra untuk menggunakan toilet biasa atau toilet difabel.</li> <li><i>Handrail</i> dipergunakan oleh difabel tunadaksa untuk berdiri sendiri.</li> </ul>	Kegunaan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Simpati orang-orang di sekitar untuk menunjukkan toilet bagi tunanetra.</li> <li>Mendapat akses kursi roda di Bandar Udara Adisutjipto.</li> <li>Bantuan dari petugas untuk mendorong kursi roda difabel tunadaksa.</li> <li>Sarana wastafel di dalam ruang toilet mempermudah difabel tunadaksa.</li> <li>Sarana <i>handrail</i> mempermudah akses toilet penyandang tunadaksa.</li> <li>Lokasi toilet berada dekat dengan penumpang difabel mempermudah akses toilet difabel bagi.</li> </ul>	Kemudahan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruangan toilet memanjang menyulitkan penyandang tunadaksa saat mengakses layanan toilet difabel menggunakan kursi roda.</li> <li>Penyandang tunanetra mampu mengakses toilet biasa dan toilet difabel.</li> </ul>	Kemandirian	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Difabel</li> <li>Lanjut usia</li> <li>Ibu hamil</li> </ul>	Penerima manfaat	Peruntukan toilet difabel

*INKLUSI:*

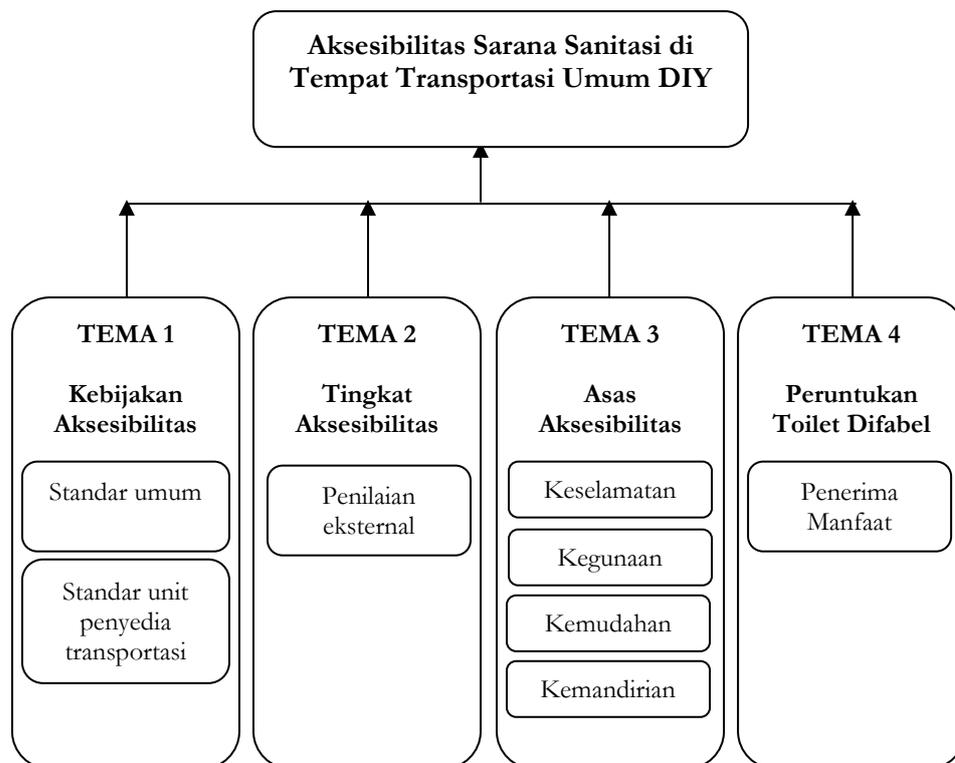
*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

Unit-unit informasi yang terkumpul dalam fakta-fakta sejenis hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara diangkat menjadi 4 (empat) tema pokok yang berhubungan dengan sarana sanitasi bagi difabel di tempat transportasi umum DIY (lihat Gambar 8).

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*



INKLUSI:  
*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

**Gambar 8.**  
Tema Aksesibilitas Sarana Sanitasi di Tempat  
Transportasi Umum DIY Berdasarkan Hasil Wawancara

Tema I tentang kebijakan aksesibilitas diangkat berdasarkan unit-unit informasi dari: 1) difabel yang memiliki pengetahuan tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar toilet difabel, 2) PT. Angkasa Pura I sebagai salah satu pengelola tempat transportasi yang memiliki Standar Pelayanan pada Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, dan 3) PT. KAI berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Tema II adalah tingkat aksesibilitas tempat transportasi umum diperoleh dari penilaian pihak luar, yaitu PT. Angkasa Pura I oleh Asosiasi Toilet Indonesia dan penilaian toilet pada PT. KAI wilayah Daop V oleh pengguna toilet melalui *toilet satisfaction* yang terpasang di pintu keluar.

Tema III yaitu asas aksesibilitas yang diambil dari unit-unit informasi hasil wawancara difabel, serta Seksi Angkutan Perkotaan Dinas Perhubungan DIY. Asas aksesibilitas terbagi menjadi 4 (empat) yaitu keselamatan, kegunaan, kemudahan dan kemandirian.

Tema IV tentang peruntukan toilet difabel, diperoleh dari hasil pemadatan unit-unit informasi dari Bagian *Customer Service and Hospitality* Bandar Udara Adisutjipto serta difabel. Isu ini dikemukakan oleh auditor eksternal untuk toilet di PT Angkasa Pura I pada tahun 2018 yaitu terdapat pengguna toilet yang termasuk dalam kelompok prioritas (lansia dan ibu hamil) tidak mempergunakan toilet difabel karena menganggap toilet difabel untuk orang cacat fisik. Hal tersebut menyebabkan antrian toilet umum menjadi sangat panjang, sedangkan tidak ada antrian di toilet difabel. Kedua unit informasi tersebut mengharapkan agar penyebutan “toilet difabel” ditiadakan atau diganti dengan kalimat lain yang mampu mengarahkan peruntukan toilet difabel yaitu difabel fisik, lansia, dan ibu hamil

## **G. Kesimpulan**

Aksesibilitas sarana sanitasi di tempat transportasi umum DIY memiliki kategori baik. Asas aksesibilitas sarana sanitasi melingkupi keselamatan, kegunaan, kemudahan, dan kemandirian sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan standar. Beberapa indikator yang belum terpenuhi yaitu keberadaan tombol darurat dan rampa lantai terlalu tinggi (asas keselamatan), serta ruangan toilet yang memanjang mengurangi kemampuan difabel secara mandiri mengakses toilet. Selain asas aksesibilitas, ternyata penerima manfaat dari toilet difabel belum tercapai. Sebagian besar masyarakat memiliki anggapan bahwa toilet difabel khusus bagi penyandang cacat, sehingga sering terjadi antrian di toilet biasa yang dilakukan oleh lansia. Hal tersebut belum sesuai dengan peruntukan toilet difabel yang diatur dalam Permen PU No.30/2006 yaitu penyandang cacat dan lansia. Melalui hasil wawancara dengan beberapa difabel, mereka mengharapkan penerima manfaat toilet difabel sesuai dengan peruntukannya, seperti halnya yang dilakukan oleh PT. KAI dalam menandai kursi penumpang khusus penyandang cacat, lansia, dan ibu hamil dengan istilah “kursi prioritas”. Istilah tersebut dianggap lebih bisa diterima di masyarakat sebagai pengguna yang perlu diprioritaskan dalam akses kursi penumpang. Demikian juga dengan istilah “toilet difabel”

diharapkan pemerintah atau unit transportasi terkait mempertimbangkan penamaan tersebut agar toilet aksesibel bagi penerima manfaat sebenarnya..

## **H. Pengakuan**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian, yaitu dukungan pendanaan dari Hibah Penelitian Dosen Pemula Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018, serta pihak yang terlibat dalam penelitian antara lain : Dinas Perhubungan Propinsi DIY, Dinas PUPKP DIY, LSM SIGAB, LSM SAPDA, PT. KAI DAOP 6, PT. Angkasa Pura 1, terminal Giwangan.

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

## REFERENSI

- AF. (2018, Juni 6). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- Agus Diono, Mujaddid, Fanciscus Adi Prasetyo, & Didik Budijanto. (2014). Situasi Penyandang Disabilitas. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, 1-56.
- AL. (2018, Juni 29). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- AR. (2018, September 21). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- Dewang, N., & Leonardo, L. (2010). Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat. *Planesa*, 1(1). Diambil dari <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/planesa/article/view/508>
- Dewi Warsito. (2015, Desember). Sudahkah Fasilitas Umum Bagi Kaum Disabilitas Ini Ada di Kota Anda. Diambil dari <https://www.1health.id/id/article/category/sehat-a-z/sudahkah-fasilitas-umum-bagi-kaum-disabilitas-ini-ada-di-kota-anda.html>
- HH. (2018, September 21). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- I Ketut Bagiastra. (2013). Analisis Manajemen Toilet Umum di Kawasan Wisata Lombok. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 7(6), 10-15.
- I Pratiwi. (2012). Difaabel yang Terlupakan. *Majalah Pledoi*.
- IS. (2018, Juni 6). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- Kebijakan Bappeda DIY Pemenuhan Hak Penyandang Difabel*.
- Kusnul Isti Qomah. (2015, Juli 6). Layanan Kereta Api: Perubahan Pola Operasi Stasiun Tugu Ditunda. *Harianjogja.com*. Diambil dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2015/07/06/510/621395/layanan-kereta-api-perubahan-pola-operasi-stasiun-tugu-ditunda>
- M. Syafe'ie, Purwanti, & Mahrus Ali. (2014). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Diambil dari <http://insistpress.com/katalog/potret-difabel-berhadapan-dengan-hukum-negara/>
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 3(2), 139-162. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>

INKLUSI:

*Journal of*

*Disability Studies,*

*Vol. 6, No. 1,*

*Jan-Jun 2019*

*Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum*

- Narulita Anugrahying Widi, & Rullan Nirwansyah. (2013). Penerapan Aksesibilitas pada Desain Fasilitas Pendidikan Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 2(2), G20-G25-G25. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v2i2.3407>
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Vol. 2005). Diambil dari [/free-contents/index.php/buku/detail/metodologi-penelitian-kesehatan-soekidjo-notoatmodjo-23012.html](http://free-contents/index.php/buku/detail/metodologi-penelitian-kesehatan-soekidjo-notoatmodjo-23012.html)
- NS. (2018, Juni 28). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- PBB Komisi Ekonomi dan Sosial Untuk Asia dan Pasifik. (2012). *Strategi Incheon untuk "Mewujudkan Hak" Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik* (hlm. 17-78). Bangkok: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Prabowo Cahyo Ariyono. (2018). *Dampak Inovasi Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Peningkatan Nilai Pelanggan di Bandara Adisutjipto Yogyakarta* (Skripsi, UII). Diambil dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7924>
- Prince, M. J. (2017). Persons with invisible disabilities and workplace accommodation: Findings from a scoping literature review. *Journal of Vocational Rehabilitation*, Vol. 46, hlm. 75-86. <https://doi.org/10.3233/JVR-160844>
- Priscyllia, F. (2016). Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *LEX CRIMEN*, 5(3). Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11701>
- RA. (2018, Agustus 10). *Aksesibilitas Sarana Sanitasi Bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum* [Wawancara].
- Rahayu, S., Dewi, U., & Ahdiyana \*, M. (2013). Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2). <https://doi.org/10.21831/socia.v10i2.5347>
- Sukmadinata, N. S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Diambil dari [/free-contents/index.php/buku/detail/metode-penelitian-pendidikan-nana-syaodih-sukmadinata-33324.html](http://free-contents/index.php/buku/detail/metode-penelitian-pendidikan-nana-syaodih-sukmadinata-33324.html)
- Suminar, R. E. (2015). Identifikasi Kemudahan Penyandang Difabilitas dalam Melakukan Pergerakan dengan Menggunakan Moda Transportasi. *INKLUSI*, 2(1), 155-192. <https://doi.org/10.14421/ijds.020107>
- Tavares, A. S., & Montenegro, G. N. (2012). Chemical toilet for persons with disabilities: Proposal for an urban furniture affordable. *Work*, 41(Supplement 1), 4754-4761. <https://doi.org/10.3233/WOR-2012-0762-4754>

---

INKLUSI:

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1  
Jan-Jun 2019*

Tribunnews. (2018). Hingga 1 Januari, Volume Penumpang Kereta Api DAOP 6 Capai 400 Ribu. Diambil 15 Januari 2018, dari Tribunnews website: <http://jogja.tribunnews.com/2018/01/02/hingga-1-januari-volume-penumpang-kereta-api-daop-6-capai-400-ribu>

White, S., Kuper, H., Itimu-Phiri, A., Holm, R., & Biran, A. (2016). A Qualitative Study of Barriers to Accessing Water, Sanitation and Hygiene for Disabled People in Malawi. *PLOS ONE*, 11(5), e0155043. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155043>

---

*INKLUSI:*

*Journal of  
Disability Studies,  
Vol. 6, No. 1,  
Jan-Jun 2019*